



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0067894.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ERNA MULIA SH.,M.HUM.,M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh ERNA MULIA SH.,M.HUM.,M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA disingkat KAPSIPI tanggal 19 Juli 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016071932100700 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA disingkat KAPSIPI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA disingkat KAPSIPI
Berkedudukan di KOTA BANDUNG, sesuai salinan Akta Nomor 01 Tanggal 15 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERNA MULIA SH.,M.HUM.,M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN SUKABUMI.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0067894.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
PROF .DR.DRS.H. UTANG SUWARYO ,MA.	195908131986011001	PENGURUS	KETUA PERKUMPULAN
PROF.DR .DRS.H.UTANG SUWARYO,MA	195908131986011001	PENGAWAS	KETUA PERKUMPULAN

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Juli 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 19 Juli 2016